

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan antara dua pihak, pihak pertama adalah pemilik (principal) dan pihak kedua adalah manajer (agent). Teori keagenan menyatakan bahwa ketika terjadi pemisahan antara pemilik sebagai principal yang menjalankan perusahaan dan manajer sebagai agent, maka timbulah masalah keagenan karena masing-masing pihak selalu berusaha memaksimalkan fungsi utilitasnya (Tia Astria, 2011).

Namun seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin besar, seringkali timbul konflik antara pemilik dan manajemen, dalam hal ini pemegang saham (investor) dan agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agent ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu atas nama principal, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh principal. Principal berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agent atas jasa yang sudah diberikan oleh agent.

Agent dan principal mempunyai perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan adanya konflik keagenan. Principal dan agent memiliki keinginan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan yang besar. Principal dan agent juga sama-sama menghindari akan terjadinya risiko (Tia Astria, 2011).

Korelasi teori agensi dapat menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi manajemen risiko dibutuhkan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) untuk dapat mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Pihak yang dapat terlibat dalam sebuah bisnis terdiri dari dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, auditor serta pihak lain yang terkait sebagai stakeholders (Rustiarini, 2011). Komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite auditor digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi dari GCG.

Pengungkapan risiko yang diberikan oleh perusahaan sangat berguna bagi para investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan dapat

berkomunikasi dengan principal (Lokaputra et al., 2022). Dengan mengungkapkan risiko, suatu perusahaan dapat memberikan informasi, khususnya mengenai risiko yang mungkin terjadi di masa depan atau risiko yang sedang dihadapi perusahaan. Pengungkapan informasi risiko yang lebih rinci dan komprehensif menunjukkan bahwa perusahaan merespons kebutuhan informasi pemiliknya (principal).

Perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil. Semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan risikonya, semakin mencerminkan kemampuannya untuk menghindari dan menangani risiko tersebut.

Informasi pengungkapan risiko yang disajikan dalam laporan tahunan suatu perusahaan sangat berguna dan diperlukan bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Menurut (Amran et al., 2009), laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengembalian keputusan kepada pemangku kepentingan perusahaan.

2.2 Pengungkapan Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan kerugian atau kegagalan akibat ketidakpastian di masa depan. Risiko disebut juga dengan ketidakpastian yang dapat menyebabkan perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh risiko tidak hanya mencakup perubahan negatif, tetapi juga perubahan positif (Effendi, 2016). Menurut (Griffin, Ricky, 2007), risiko adalah ketidakpastian mengenai kejadian di masa depan mengenai hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. (Anisa & Prastiwi, 2012) menjelaskan bahwa risiko dapat digambarkan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam pengertian yang lebih luas, risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau kebalikan dari hasil yang diinginkan. Strategi untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan adalah pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Dengan membatasi manajemen risiko yang dilakukan perusahaan perusahaan, mereka dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut (Amran et al., 2009) manajemen risiko adalah proses dan metode yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko atau menangkap peluang yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. (Amran et al., 2009) kerangka manajemen risiko mencakup proses-proses berikut:

1. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi jenis risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan
2. Memilih metode atau langkah strategis yang tepat untuk mengelola risiko, seperti memutuskan apakah akan menghindari risiko, mengurangi risiko, atau mengalihkan risiko kepada pihak lain.
3. Memantau dan mengawasi seluruh rencana tindakan untuk mengatasi risiko yang mungkin akan timbul.

Pilihan manajemen risiko yang umumnya diambil oleh masing-masing perusahaan berbeda satu sama lain, dan meskipun perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di industri serupa, mereka mungkin menghadapi risiko serupa. Hal ini karena perusahaan manajemen yang berbeda memiliki strategi manajemen, toleransi risiko, dan tujuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk lebih memperhatikan risiko bisnis utama dan bagaimana setiap risiko dikelola oleh perusahaan.

Peraturan tentang pengungkapan risiko dalam laporan tahunan di Indonesia diterbitkan oleh Bapepam, IAI, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan yang dikeluarkan Bapepam adalah keputusan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan yang mewajibkan emiten menyampaikan laporan yang menjelaskan risiko yang dihadapi oleh perusahaan, dan upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko tersebut dalam laporan tata kelola perusahaan.

Persyaratan pengungkapan risiko bagi perusahaan berstatus BUMN diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang BUMN. Yakni BUMN pasal 28(2) tentang peraturan praktik *good corporate governance* (GCG) Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 yang menjelaskan bahwa selain laporan tahunan dan laporan keuangan, BUMN memuat penilaian manajemen perusahaan terhadap investor, pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk faktor risiko yang material dan dapat diperkirakan di dalamnya juga dijelaskan bahwa hal-hal penting dalam pengambilan keputusan juga harus diungkapkan.

Definisi COSO tentang ERM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan, dirancang untuk diterapkan dalam setiap strategi perusahaan dan menghasilkan keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan perusahaan. Penerapan manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko perusahaan pada setiap aktivitas dan mengukur serta mengendalikannya pada tingkat tertentu yang dapat diterima. Kerangka integrasi COSO ERM memberikan gambaran umum tentang penerapan manajemen risiko di perusahaan. Berdasarkan kerangka ERM yang diterbitkan COSO, terdapat 108 elemen pengungkapan ERM yang mencakup delapan aspek yaitu: (1) lingkungan internal, (2) tujuan, (3) identifikasi kejadian, (4) penilaian risiko, (5) respon terhadap risiko, (6) kegiatan pengawasan, (7) informasi dan komunikasi, (8) pemantauan (Agista et al., 2017).

2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance ialah seperangkat peraturan serta upaya perbaikan sistem serta proses pada pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas korelasi, kewenangan, hak serta kewajiban semua pemangku kepentingan, baik rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris maupun dewan direksi (Pranogyo et al., 2023).

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utamanya menaikan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang menggunakan dan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai akibatnya dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem atau hukum yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik menggunakan memperjelas hak-hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi yang memiliki kepentingan internal dan eksternal bagi para *stakeholder*.

Setelah krisis moneter di negara-negara Asia pada tahun 1997 dan kejatuhan perusahaan raksasa global terkemuka, perhatian global terhadap *Good Corporate Governance* meningkat pesat. Termasuk HIH Insurance dan Enron Corporation di Amerika Serikat, Company Ltd, One-Tell Pty Ltd di Australia dan permalat di Italia pada ini hari tahun 2000 an. Temuan dari analisis yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional serta Regulator pemerintah di banyak negara membuat karena dasar pembentukannya kejadian ekonomi atau bisnis yang menyebabkan kurangnya manajemen perusahaan di sebagian besar sektor bisnis.

Dalam industri manufaktur, *corporate governance* merupakan aspek bernilai dalam memelihara keyakinan serta kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Good corporate governance dialami terus menjadi berarti bersamaan dengan meningkatnya risiko bisnis serta tantangan yang dialami oleh industri manufaktur. Dengan mengedepankan tata kelola industri yang baik (*good corporate governance*) serta pengelolaan risiko yang baik, perusahaan diharapkan bisa bebas dari akibat kurang baik krisis perekonomian global. Dalam tiap pengambilan keputusan bisnis mempunyai faktor ketidakpastian serta pula memunculkan risiko. Untuk menyikapi perihal tersebut industri manufaktur tetap mengelola risiko lewat pengawasan yang efisien serta pengendalian internal bagaikan bagian dari prinsip-prinsip *corporate governance*

2.3.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance .

Good corporate governance mengandung lima prinsip utama yaitu transparansi , akuntabilitas , tanggung jawab , independensi serta kesetaraan menurut (Effendi, 2016) yaitu:

1. Prinsip Transparansi Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Prinsip akuntabilitas ini akan efektif jika masing-masing pihak dapat menjaga tanggung jawabnya dan tidak mencampuri kepentingan pihak lain.
3. Prinsip Responsibilitas Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi dan warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengutamakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.
4. Prinsip Independensi Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik, serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundangan yang berlaku dan prinsip good corporate governance.
5. Prinsip Kesetaraan Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham harus mendapatkan perlakuan yang sama. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha bank.

2.4 Dewan Komisaris Independen

(Sukrisno, n.d.) komisaris independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas).

Pihak yang ditunjuk tidak mempunyai kedudukan untuk mewakili pihak manapun dan ditunjuk semata-mata berdasarkan latar belakang pengetahuan profesional, pengalaman dan keahliannya untuk melaksanakan tugas yang sepenuhnya menjadi kepentingan perusahaan.

2.5 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pertukaran keahlian, pikirandan informasi dalam dewan juga akan lebih luas dan beragam. Semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi pula (Intia & Azizah, 2021).

Kerugian pada ukuran dewan komisaris yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antaramanajemen dan principal (Intia & Azizah, 2021). Dengan kata lain, ukuran dewan yang terlalu besar juga dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.

(Eka, 2011) mengatakan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitiannya tersebut, disebutkan argument dari (Yermack, 2017) dan (Meckling, 1976), menyatakan bahwa semakin banyak anggota yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat buruk bagi kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan komisaris. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak.

2.6 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Mubarok, 2013).

Menurut teori keagenan, ukuran komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Mubarok, 2013). Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggungjawab, terbuka, dalam pelaporan keuangan dan menghindari praktik manipulasi pengungkapan informasi mengenai risiko karena komite audit akan memonitor kegiatan yang ada di perusahaan. Sehingga dengan semakin besarnya ukuran komite audit, maka akan semakin besar juga pengawasan yang harus dilakukan atas luas informasi yang diungkapkan dalam *annual report*. Ukuran komite audit adalah jumlah orang yang berperan menjadi anggota dalam komite audit. Jumlah tersebut menjadi proksi dalam mewakili ukuran komite audit yang dapat menjelaskan pengaruhnya dengan pengungkapan risiko di annual report perusahaan (Kencana, A., & Lastanti, 2018).

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah table penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Peneliatian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
(Solikhah, 2019)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan risk management committee memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Variabel Leverage, Kepemilikan public, diversitas latar belakang Pendidikan dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
(Praminata, 2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor barang konsumsi.	Kepemilikan manajerial, kepemilikan saham berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

	(Puspitasari, 2022)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management	Dewan komisaris, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management.
4.	(Lokaputra et al., 2022)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Selanjutnya faktor kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Faktor komisaris independent tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Faktor komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen

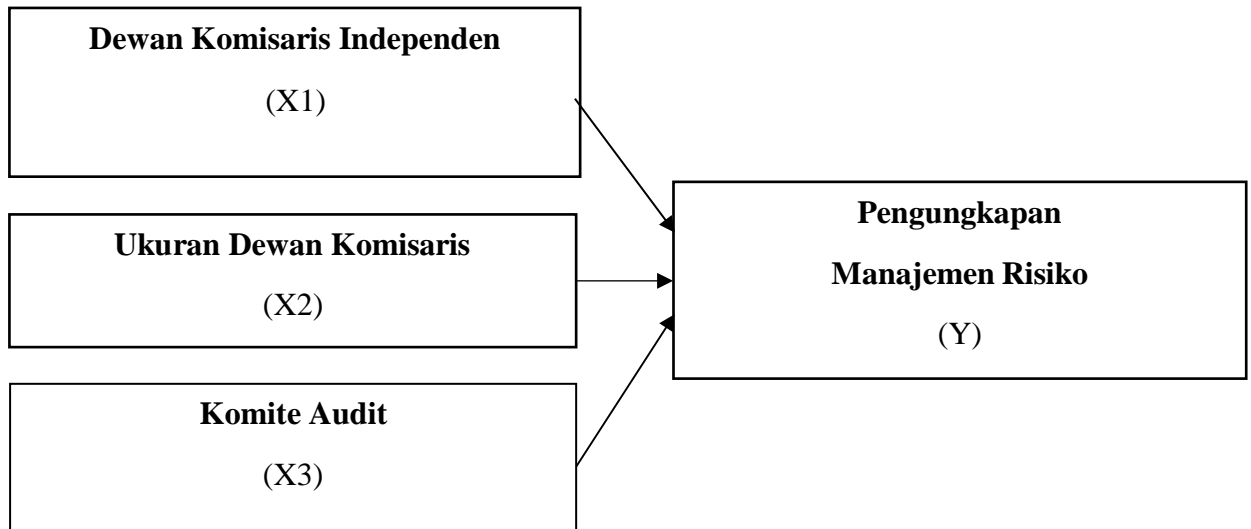
			risiko.
5.	(Muslih & Maghfiroh, 2023)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan	Dewan direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite manajemen risiko memiliki pengaruh secara simultan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dewan Direksi memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko. Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

6.	(Swarte et al., 2020)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, kepemilikan asing berpengaruh positif dan
			tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, ukuran komitei audit berpengaruh positif dan tidak signifikan, selanjutnya variabel kepemilikan publik dan ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian

Model kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut teori agensi dewan komisaris independen dapat mengurangi permasalahan agensi karena keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh manajer melalui mekanisme pengawasan. Mekanisme ini akan mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas, makadari itu komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2016). Adanya

komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen (Swarte et al., 2020). Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparansi dalam perusahaan. Fungsi pengawasan dewan komisaris yang baik tidak hanya berdasarkan pada kuantitas komisaris independen dalam suatu perusahaan, namun lebih ditentukan pengalaman, kompetensi dan komitmen dalam menerapkan dan mengungkapkan manajemen risiko serta spesialisasi yang sesuai dengan bidang perusahaan, sehingga menunjang dewan komisaris independen untuk memahami profil risiko sesuai dengan bidang perusahaan (Agista et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, 2022) berpendapat bahwa Komisaris independen punya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen resiko perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis pertama adalah:

H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

2.9.2 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggotanya. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Sukasih & Sugiyanto, 2017). Terdapat pandangan bahwa independensi dewan komisaris yang lebih besar baik untuk meningkatkan performance bagi perusahaan karena mereka mempunyai berbagai kemampuan yang lebih beragam dalam membantu membuat keputusan- keputusan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Solikhah, 2019) dan (Puspitasari, 2022) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis kedua adalah:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen risiko.

2.9.3 Komite Audit Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Komite audit sebagai Komite Penunjang Dewan Komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko suatu perusahaan. Hal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan kinerja Komite Audit dapat membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006). Berdasarkan teori keagenan, untuk menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan pemilik (principal) dan manajemen (agent), komite audit harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan dalam pertanggungjawaban terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak (Ruwita, C., & Harto, 2013). Pengetahuan dan pemahaman tersebut bisa didapatkan dengan saling bertukar pendapat dengan anggota yang lain. Sehingga, diperlukan anggota komite audit yang lebih dari satu orang agar dapat saling bertemu dan bertukar pendapat. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Pertukaran pengetahuan itu akan membuat anggota komite audit lebih memahami permasalahan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar jumlah komite audit dalam perusahaan maka dapat mempengaruhi luas pengungkapan risiko dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Swarte et al., 2020) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga adalah:

H3: Komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.